

MEMBONGKAR RASIONALITAS: PEMIKIRAN AMARTYA SEN TENTANG KEKUASAAN EKONOMI

Wilhelmus F. N. Runesi | Undergraduate Student of Philosophy
Widya Mandira Catholic University
Kupang, Indonesia

Abstract:

Discussing about rationality is often related to human actions, because humans are considered as rationalist creatures who act to realize and decide things with their thinking abilities. The question is whether the society is becoming less critical in seeing the political games played by the power elite, or the authorities are using power to create fear by spreading some rationalizing concepts in such a way that they are accepted as truth. By tracing Amartya Sen's thoughts, the author of this article tries to show the initial position (*arabe*) of economics as a moral science, which seems to have been poisoned by desires for self-interest only. This article tries to reveal the fallacy of rationality behind the policies that have been used to implement power, which in this case have been promulgated by the government regarding economics in order to overcome various social and humanitarian problems such as poverty, hunger, and injustice in the society.

Keywords:

rationality • economics • power • social policies • ethics • self-interest

Pendahuluan

Manusia, karena pengaruh kapitalisme ekonomis, tampaknya tidak terarah pada keberlanjutan kehidupan di masa depan, melainkan dibentuk dengan tujuan “apa yang hendak diperoleh”, dan karenanya tindakan manusia bersifat konsumtif. Pada akhirnya orang tentu membutuhkan

makan untuk dapat hidup, akan tetapi persoalannya tidak hanya berakhir pada makan dan minum, melainkan dibutuhkan pandangan bijak yang mampu menopang keberlanjutan sumber daya alam dan juga mendukung sumber daya manusia bagi generasi yang akan datang. Dalam kerangka itu, terlihat sumbangan Amartya Kumar Sen, seorang ekonom dan filsuf India, bagi perkembangan ekonomi dengan menempatkan kembali ilmu ekonomi sebagai ilmu moral. Tulisan ini menunjukkan keterlibatan Sen dalam refleksi filosofisnya dalam membicarakan tentang rasionalitas kekuasaan ekonomi. Sen berusaha menempatkan kembali ilmu ekonomi pada posisi asalnya, serta menganalisis pentingnya pertimbangan kritis. Apa yang ditawarkan Sen adalah bagaimana setiap kebijakan dapat disebut sebagai masuk akal, jika dan hanya jika telah melalui pertimbangan kritis.

Pengaruh awal Sen memasuki ranah kajian filosofis pertama-tama sebagai bentuk tanggapan atas apa yang ditawarkan oleh Kenneth Arrow. Arrow melalui bukunya *Social Choice and Individual Values* menawarkan suatu konsep yakni pilihan sosial dan nilai individu yang mencoba menghidupkan kembali apa yang pernah muncul saat revolusi Perancis. Oleh karenanya, melalui bukunya *Collective Choice and Social Welfare*, Sen hendak menunjukkan bahwa putusan kolektif akan turut berpengaruh pada kesejahteraan sosial. Kritik atas rasionalitas kekuasaan ekonomi yang dilakukan Sen sekaligus merupakan perhatiannya terhadap persoalan naluri kekuasaan. Bagi Sen, nalar harus mampu membendung naluri sehingga setiap keputusan yang dibuat dapat bermanfaat bagi kebaikan bersama. Akibatnya, setiap kebijakan politik dan ekonomi akan dipengaruhi oleh naluri yang beroperasi di alam bawah sadar setiap orang yang kemudian tanpa disadari, dalam setiap upaya membuat kebijakan, sering kali mengabaikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh kaum miskin dan terlantar.

Ekonomi dan Etika

Pemikiran Amartya Sen mengenai bagaimana seharusnya ekonomi itu berjalan dapat dijumpai dalam bukunya yang berjudul *On Ethics and Economics*. Buku ini menghubungkan etika dan ekonomi, sebuah pembahasan yang cenderung “kurang diakui” oleh kalangan ekonom karena argumen yang terkandung dalam buku itu menjadi semacam ‘gangguan’ dalam praktik manajemen, bisnis, dan pembangunan. Dianggap sebagai gangguan

karena para ekonom rupanya terpengaruh oleh sebuah buku yang ditulis oleh seorang pemikir etika Abad ke-19, Francis Ysidro Edgeworth. Salah satu bagian dalam buku itu menyatakan, “prinsip pertama Ekonomi adalah setiap orang digerakkan [*actuated*] hanya oleh kepentingan-diri [*only by self-interest*]”.¹ Buku itu merupakan “aplikasi matematika pada Perasaan, Rasa Nikmat, dan Rasa Sakit”.² Aplikasi itu terutama dilakukan bagi presisi metodologis atas dua aliran etika, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Egoisme menyangkut “kalkulus ekonomis yang mengkaji ekuilibrium sistem daya-daya hedonis yang terarah kepada kegunaan individual yang maksimal”, sedangkan kalkulus Utilitarian “menyelidiki ekuilibrium suatu sistem di mana keseluruhan dan masing-masing mengarah kepada manfaat umum yang maksimal”.³

Oleh karena itu, Sen mencoba melakukan pemeriksaan atas prinsip ekonomi model Edgeworth itu dengan mengatakan, “Gambaran manusia seperti itu telah berlanjut sampai hari ini dalam model-model ekonomi, dan inti teori ekonomi tersebut telah dipengaruhi begitu dalam oleh pengandaian dasar tersebut”.⁴ Sen yang merupakan seorang ekonom sejati dan juga ahli ekonometri, menggunakan keahliannya untuk mengamati masalah-masalah kemanusiaan, terutama persoalan yang dihadapi oleh lapisan masyarakat yang dimiskinkan oleh proses pembangunan yang hanya berorientasi pada pasar dan bisnis. Sen juga mengakui peranan pasar yang memproses informasi, namun ketika melihat kompleksnya persoalan yang ditimbulkan, ia menjadi yakin bahwa dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat dilampaui oleh pasar. Menurut Sen, rakyat akan dilampaui oleh informasi pasar apabila mereka kurang berpendidikan, menderita sakit, atau mengalami diskriminasi.⁵

Fokus Sen terhadap Ilmu Ekonomi Pembangunan atau lebih khususnya Ekonomi Kesejahteraan sangat besar terutama pada masalah praktik-praktik pembangunan yang merampas hak-hak asasi manusia. Menurut Sen, sesungguhnya ilmu ekonomi berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana sesuatu itu berkembang bagi kesejahteraan anggota masyarakat. Itulah masalah sentral ilmu ekonomi kesejahteraan, yakni jika orang ingin mengatakan bahwa masalahnya berkembang ke situasi yang sangat buruk, maka seharusnya menjelaskan mengapa muncul penilaian itu, mengapa mengambil keputusan itu, dan mengapa pandangan itu merupakan hal yang tepat. Sen menunjukkan adanya penciptaan jarak yang

serius antara ekonomi dan etika yang menjadi salah satu kelemahan utama teori ekonomi saat ini.⁶ Di sini, Sen berpandangan bahwa karena perilaku aktual manusia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan etika, pertimbangan-pertimbangan ekonomi kesejahteraan pasti berpengaruh pula pada perilaku aktual.⁷

Ketidakadilan Ekonomi

Ekonomi telah dirasuki hasrat untuk menyingkirkan orang miskin.⁸ Kalimat ini tampaknya menjadi inti persoalan ketidakadilan ekonomi. Bila dilihat perkembangan ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu, dimulai dari pembicaraan mengenai tata kelola rumah tangga dan ladang (*oiconomia*) ala Yunani Kuno, lalu dianggap sebagai ilmu yang berkaitan dengan persoalan moral serta menyangkut urusan pengadaan kebutuhan (material) hidup ala Abad ke-19. Apa yang menjadi corak ilmu ekonomi hingga saat ini dimulai pada Abad ke-20 dikenal sebagai mazhab Neo-klasik yang berbicara tentang nilai suatu barang/jasa yang bukan lagi terletak pada sifat fisik kerja (*physicality of human labour*) melainkan terletak pada ciri lentur hasrat manusia (*malleability of human desire*), yang merupakan pembaruan dari mazhab klasik.⁹ Oleh karena pengaruh cara pandang arus utama, ekonomi sebagai ilmu moral tercemar oleh tindakan manusia yang cenderung hanya berurusan dengan maksimalisasi kekayaan, maka Sen hendak menunjukkan seperti apa ketidakadilan ekonomi dalam setiap kebijakan publik dewasa ini. Dalam bukunya *Development As Freedom*, Sen mengajukan pertanyaan: *Inequality of What?*¹⁰

Seperti yang dipahami dewasa ini, berbicara mengenai ekonomi berarti berbicara tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh penghasilan walau hanya untuk sekadar dapat menikmati hidup tanpa kelaparan. Artinya, berbicara tentang ekonomi, berarti secara harafiah boleh dikatakan sebagai pembicaraan mengenai isi dapur setiap keluarga. Akan tetapi, perkembangan ilmu ekonomi mengakibatkan adanya ketimpangan yang justru membuat manusia mengalami kesulitan untuk mengatasi persoalan yang diciptakannya sendiri. Bagi Sen, perilaku ketimpangan dalam suatu evaluasi ekonomi dan sosial menimbulkan banyak sekali dilema sosial.¹¹ Ketidaksetaraan substansial seringkali sulit dipertahankan dalam model 'keadilan'. Seperti juga kepedulian Adam Smith terhadap kepentingan

kaum miskin—disertai dengan kemarahannya karena ketimpangan-ketimpangan tersebut diabaikan—terkait secara alami dengan penggunaan perangkat imajinatifnya mengenai apa yang tampak seperti suatu *impartial spectator*.¹²

Dari Edgeworth, orang mengetahui bahwa prinsip pertama ekonomi adalah setiap orang digerakkan hanya oleh kepentingan-diri yang kemudian dianggap Sen sebagai sesuatu yang berbahaya.¹³ Sementara itu, Marx melihat ketidakadilan ekonomi ditandai ketidakseimbangan dalam hal pendapatan/gaji yang diperoleh para buruh yang hanya sebatas untuk mempertahankan hidup, sedangkan kaum kapitalis terus-menerus memperkaya diri dengan cara perbandingan antara gaji buruh dan nilai tambah.¹⁴

Salah satu pengalaman masa kecil Sen yang sangat kuat membekas dalam benaknya adalah kematian seorang Muslim bernama Kader Mia yang mampir ke rumahnya dengan badan penuh luka karena dikeroyok oleh massa yang beragama Hindu. Kematian itu adalah akibat yang harus ditanggung setelah ia terpaksa harus keluar dari rumah—meski dilarang oleh keluarganya—untuk menjadi buruh serabutan demi memperoleh sedikit uang bagi keluarga yang sedang kelaparan.¹⁵ Di sini muncul pertanyaan: Mia tewas karena identitasnya sebagai minoritas atau tewas karena miskin? Di sini dicoba sedikit mengambil jalan berputar untuk melihat perbandingan antara konflik yang diuraikan oleh Sen di atas yang terjadi pada tahun 1940-an itu dengan apa yang bisa dilihat dalam konteks di Indonesia saat ini. Persoalan ketidakadilan ekonomi sering terjadi akibat adanya pergeseran paradigma yang diolah oleh para aktor politik dengan memainkan “psikologi massa.”¹⁶ Bila melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, terdapat dua kategori persoalan: yang berkaitan dengan alam dan persoalan yang berkaitan dengan manusia itu sendiri—persoalan lingkungan hidup yang meliputi pertambangan, pengrusakan hutan, serta *human trafficking*—di sini dilihat bahwa semuanya selalu berkaitan dengan ekonomi. Kader Mia seperti yang dikisahkan Sen di atas merupakan personifikasi dari sekian banyak orang yang sering kali dihimpit oleh kebijakan rezim pemegang kekuasaan. Pertanyaan yang muncul di atas bukan lagi sebatas pertanyaan untuk menjawab kegelisahan, melainkan realitas ketiadaadilan ekonomi itu sendiri. Kader Mia mati di tengah himpitan antara kelaparan keluarga dan risiko yang harus ditanggung.

Sen menulis bahwa “hubungan mengenaskan antara kemiskinan ekonomi dengan ketidakbebasan menyeluruh, bahkan ketidakbebasan untuk menjalani hidup, adalah kenyataan mengejutkan yang mengguncang benak muda saya dengan kekuatan yang tak habis-habisnya”.¹⁷

Ekonomi yang sejak awal dianggap selain sebagai bagian dari persoalan moral, juga dikenal sebagai ilmu yang berurusan dengan ketersediaan isi dapur, lambat laun menjadi sangat bengis ketika manusia berada di antara dilema pilihan seperti yang dialami oleh Mia. Di tempat lain, Sen mengatakan penilaian ketidakadilan dapat diambil dengan melihat dua hal, yakni pluralitas ruang di mana ketidakadilan dapat diukur dan juga perbedaan setiap individu. Setiap pribadi memiliki keuntungan yang relatif, sehingga membuat perbandingan antarpribadi akan berjumpa dengan beragam perspektif yang berbeda-beda pula, karena bermacam konsentrasi antara lain: hak, kebebasan, pendapatan, jumlah kekayaan, sumber penghasilan, hal-hal pokok, utilitas, kapabilitas, dan sebagainya, serta pertanyaan sejauh mana ketidakadilan dapat dinilai, hanya dapat diajukan dalam ruang lingkup di mana keadilan dapat ditakar.¹⁸

Sering kali tata kelola yang salah dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, misalnya, berakibat pada penggunaan sumber daya yang sia-sia dalam perekonomian, padahal persoalan yang sebenarnya adalah sejauh mana—baik pasar maupun negara—memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan ekonomi secara efisien dan efektif. Di sini dilihat negara mempunyai kekuatan dalam hal pengaturan atau regulasi, sedangkan pasar mempunyai kekuatan atas penggunaan sumber daya yang efisien dalam produktivitasnya.¹⁹ Di era post-modern ini, dengan persoalan mengglobalnya berbagai aspek hidup manusia, segala sesuatu menjadi semata-mata persoalan bisnis. Semua aspek hidup dan segala bidang kehidupan memiliki satu tujuan akhir yakni adanya akumulasi harta kekayaan. Oleh karena itu, Herry-Priyono menyebut globalisasi adalah soal peluang yang lebih lebar mendorong kinerja modal, karena akumulasi kapital tak mengenal batas. Globalisasi adalah naluri individualistis yang terlembaga dalam berbagai bentuk.²⁰

Sebagai contoh, bagaimana kebijakan ekonomi bisa berperan dalam penyingkiran orang miskin di Indonesia, misalnya, dapat dilihat pada salah satu bidang, yakni bidang agraria, praktik perampasan tanah, pengusiran masyarakat, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terjadi di mana-mana.

Catatan tahunan yang dikeluarkan badan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2021-2022 mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022 terjadi 212 konflik agraria yang mencakup 1.035.613 hektar lahan, dan sejumlah 346.402 KK terdampak. Hal itu mengalami peningkatan luas lahan konflik dibanding tahun 2021, ketika luas lahan 500.062 hektar dan 198.895 KK terdampak. Bila dijabarkan lebih lanjut, persoalan itu meliputi sektor perkebunan 99 kasus, infrastruktur 32 kasus, properti 26 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, fasilitas militer 6 kasus, pertanian/agribisnis 4 kasus, pesisir dan pulau-pulau kecil 4 kasus.²¹

Contoh di atas menunjukkan bagaimana kapitalisme menciptakan ketidakadilan ekonomi, dengan narasi kesejahteraan, negara melalui para makelar oligarki mengintervensi kehidupan manusia sampai titik paling intim kehidupan itu sendiri. Disebut “titik paling intim” karena kehidupan itu berlangsung di atas bumi, sedangkan bumi yang dihuni dieksploitasi dan kemudian masyarakat yang melawan diintimidasi dan bahkan mengalami kekerasan oleh aparat pemerintah, yang terlembaga dan memperoleh legitimasi serta pembenaran.²² Ketika berbicara mengenai persoalan bagaimana keterkaitan peran badan intelijen negara dalam persoalan perdagangan manusia, serta persoalan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pemilikan tanah, ditemukan bahwa berbagai persoalan itu bermula dari keinginan mengakumulasi kekayaan. Persoalan tersebut tidak akan pernah tuntas diselesaikan karena adanya aktor besar yang bermain di balik semua itu. Dengan demikian, dalam setiap persoalan yang terjadi antara penguasa dan masyarakat kecil, sering kali yang menjadi korban adalah masyarakat kelas bawah yang minim informasi dan argumentasi, yang dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai sistem serta aturan yang timpang.²³

Sen menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara ketimpangan (*inequality*) dan pemberontakan (*rebellion*) berjalan dalam dua arah. Bahwa ketimpangan yang dirasakan kemudian menjadi bahan pemberontakan kiranya menjadi jelas dan tak terbantahkan. Namun di satu sisi, penting untuk mengakui bahwa persepsi ketidaksetaraan serta isi dari konsep yang inklusif akhirnya bergantung pada kemungkinan pemberontakan yang sebenarnya.²⁴ Dalam menilai masalah ketidakadilan, Sen membagi dalam dua langkah, yakni langkah positif secara eksplisit

tanpa konsep kesejahteraan sosial, dan langkah-langkah normatif yang didasarkan pada formulasi eksplisit tentang kesejahteraan sosial serta kerugian yang ditimbulkan dari persoalan tersebut.²⁵ Sen berperan dalam mendudukkan kembali pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem sosial. Dengan kata lain, berbicara mengenai ketercerabutan, krisis adalah gejala yang paling nyata, setelah terlepasnya ekonomi dari sistem sosial dan tatanan nilai masyarakat yang berorientasi pada kebaikan bersama. Dari situ, Sen menaruh minat besar pada krisis ketidakadilan.²⁶

Dengan merumuskan kembali bagaimana persoalan keadilan yang telah lama di utak-atik oleh para pemikir sejak zaman Yunani Kuno hingga di abad modern ini, ternyata tidak terjawab secara tuntas bagaimana seharusnya ketidakadilan itu diatasi. Oleh karena itu, bagi Sen, pembicaraan mengenai keadilan harus bermuara pada bagaimana mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan, dan bukan hanya menunjukkan karakterisasi masyarakat yang adil.²⁷ Orang bisa melihat kembali perkembangan sejarah ekonomi, tetapi sejarah juga hanya merupakan perkawinan hasrat, tindakan, dan gagasan. Dengan demikian, kemudian gagasan direka-reka demi membenarkan hasrat dan tindakan maksimalisasi. Akhirnya, pola yang dijalankan adalah bagaimana membuat persoalan terkait ekonomi-krisis beras atau minyak goreng—sebagai serupa dengan peristiwa alam seperti tsunami atau gempa bumi. Pertanyaan “siapa” (*who*) aktor di balik persoalan—perdagangan orang dan penggundulan hutan—diusir, kemudian diganti dengan “apa” (*what*) dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi (yang tentu saja bisa dibaca sebagai “akumulasi kekayaan”). Dari situ siasat bukannya tidak berguna, sebab ia menghindarkan analisis ekonomi dari selera pribadi. Ekonomi yang sejak awal dikenal sebagai ilmu manusia justru dikosongkan dari manusia. Pengosongan ‘siapa’ itu menjadi upaya untuk membuang tanggung jawab (*responsibility*).²⁸

Membongkar Rasionalitas

a. *Rasionalitas dan Kebebasan*

Keterlibatan Sen dengan problematika rasionalitas (*rationality*) sudah muncul jauh sebelum menjadi dosen, yakni ketika masih kuliah sarjana ekonomi dan matematika pada Presidency College, Calcutta, sebelum melanjutkan studi lanjut di Universitas Cambridge. Salah satu pemicu

keterlibatan Sen terkait problem ini adalah sebuah karya dari seorang ekonom bernama Kenneth Arrow tentang teori pilihan sosial, *Social Choice and Individual Values* yang terbit pada 1951. Lalu pada 1970, Sen menerbitkan buku dengan judul *Collective Choice and Social Welfare*, untuk menanggapi teorema yang ditawarkan oleh Arrow.²⁹ Sen mengakui bahwa setiap pilihan sosial tidak bisa ditentukan berdasarkan pilihan satu orang, sebab perlu mempertimbangkan pendapat yang lebih luas.³⁰

Ketika terpilih sebagai pemenang hadiah Nobel atas sumbangannya dalam bidang ekonomi yang disebut *welfare economics*,³¹ Sen memilih “teori pilihan sosial” sebagai topik kuliah Nobel, karena bidang itu mengkaji bagaimana sekelompok orang menyusun sebuah keputusan mulai dari komunitas terkecil sampai satuan masyarakat besar.³² Di sini, dapat dilihat bahwa keterlibatan Sen ke dalam persoalan rasionalitas hendak menunjukkan bagaimana rasio instrumental dipakai oleh penguasa untuk membenarkan setiap tindakan dari kebijakan yang diambil. Meminjam apa yang pernah dikatakan oleh Pierre Bourdieu, adalah pemerintah-pemerintah sendiri yang memulai berbagai langkah ekonomi yang persis telah membawa mereka ke dalam perangkat ketakberdayaan ekonomi. Jika sedikit mengambil jalan berputar, ada pertanyaan lain: Apakah keberhasilan kebijakan ekonomi itu bebas dari instrumen kepentingan-diri dan maksimalisasi kekayaan? Tentu tidak, sebab setiap kebijakan ekonomi pemerintah selalu dikendalikan oleh pemodal yang menyibukkan diri pada hasrat untuk memiliki harta serta mengejar kekayaan. Oleh karena itu, sebagai *homo oeconomicus*, manusia (baca: penguasa) dikacaukan oleh problem bagaimana menentukan dengan tepat perbedaan-perbedaan mendasar antara individu yang satu dengan individu yang lain, tanpa menyadari bahwa ada banyak pilihan sebanyak jumlah manusia. Pemerintah merasa memiliki satu agregat dasar tentang hasil yang akan diperoleh dari setiap kebijakan publik yang diambil; inilah yang dipersoalkan Sen sebagai kesesatan rasional.³³

Dengan demikian, kajian rasional perlu dilakukan dengan cermat, sebab ketika melaksanakan suatu kebijakan, kebutuhan masyarakat kecil lainnya diabaikan. Persoalan ini timbul akibat gambaran manusia yang dipakai berupa postulat yang telah diseleksi bagi kecocokan (dengan) model kebijakan yang diambil, “Sehingga gambaran-gambaran manusia lain yang tak dapat diakomodasi dengan model kebijakan akan ditepiskan, karena dianggap tidak penting untuk dipikirkan”.³⁴ Persoalan yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng, misalnya, bila memakai cara pandang terhadap

manusia di atas bukan lagi soal apakah itu benar, tetapi bagaimana model kebijakan itu *dapat* benar. Di sini “tuntutan rasionalitas bukan pertamanya soal kesesuaiannya dengan tujuan atau nilai-nilai tertentu (termasuk pemenuhan kepentingan-diri yang maksimal), tetapi tuntutan agar tujuan [*goals*] maupun nilai-nilai yang bukan tujuan [*non-goals*] dapat dilandaskan pada pertimbangan dan pemeriksaan yang cermat”.³⁵

Akibat disibukkan oleh kecemasan, masyarakat lalu kehilangan nalar kritisnya, dan menerima itu sebagai hal yang normal. Padahal, fenomena “kelangkaan [*scarcity*] terjadi bukan karena barangnya tidak ada (barang tetap melimpah), tetapi karena penjual tidak mampu menjual dengan harga yang mampu dibayar oleh pembeli atau pembeli tidak mampu membayar dengan harga yang ditetapkan oleh penjual”.³⁶ Dengan demikian, nalar yang rasional telah kehilangan daya gigit di tengah gempuran hasrat kapitalis untuk meraup keuntungan. Semuanya menjadi jinak di hadapan kapital, karena selain “nalar yang belum berhasil menjinakkan naluri, tetapi di lain pihak, naluri yang destruktif menolak untuk tunduk pada nalar”.³⁷ Di sini rasio mati di hadapan naluri.

b. *Rasionalitas dan Keadilan*

Tentang problem rasionalitas dan keadilan, teori kritis Mazhab Frankfurt misalnya, telah berbicara mengenai rasio objektif dan rasio instrumental. Problematika rasional yang diurai oleh sekolah Frankfurt melalui tokohnya Horkheimer berangkat dari pandangannya bahwa realitas zaman ini sudah sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Bahkan Horkheimer mengatakan bahwa realitas zaman ini merupakan suatu realitas teknologi ketika masyarakat melulu menjadi teknokratis.³⁸

Pertanyaannya: Mengapa rasionalitas teknis dapat begitu mendalam berperan dalam kehidupan manusia? Jawabannya tidak lagi diturunkan dari bidang ekonomi, melainkan dari konsep rasionalitas itu sendiri, sehingga akal budi melulu instrumental. Dengan kata lain, manusia hanya berpikir secara instrumental dan tanpa sadar menempatkan diri “sebagai barang” serta menyediakan diri sebagai alat atau mesin belaka yang siap dikendalikan. Kondisi ini memberikan ruang bagi kapitalisme untuk memonopoli serta mengobrak-abrik bidang-bidang tak sadar individu, serta mengeksploitasinya demi mendukung sistem yang sedang dijalankan yakni maksimalisasi kekayaan.³⁹ Penerus Teori Kritis seperti Jürgen Habermas, di satu sisi mengatakan bahwa dunia modern diatur oleh

tatanan kehidupan tempat dua kompleks rasionalitas lainnya—rasionalitas kognitif-instrumental dan rasionalitas estetis-praktis—mendominasi dan dalam pembagian kerja, membangun suatu “dominasi dunia yang tidak bersahabat”. Di hadapan dunia ini, representasi moral yang ditujukan kepada otonomi yang berakar pada rekonsiliasi komunikatif tidak lagi memiliki kesempatan yang memadai untuk membangun dirinya.⁴⁰ Sementara itu, di lain sisi John Rawls melalui bukunya *A Theory of Justice* hendak mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan. Yang dimaksud Rawls dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi yang telah dibentuk serta mempunyai dampak bagi tindakan sosial kita.⁴¹

Atas pengaruh Habermas dan Rawls, Sen kemudian mengajukan argumentasi bahwa secara metodologis, objektivitas prinsip-prinsip moral merupakan hasil diskursus rasional di antara mereka yang rasional. Melalui diskusi rasional tersebut, objektivitas personal yang memiliki kemampuan rasional dapat memberikan pertimbangan rasional atas pandangan-pandangan lainnya. Berdasarkan teori moral tersebut, Sen kemudian mengkritik pandangan utilitarianisme libertarian yang dibangun oleh John Stuart Mill.⁴²

Dalam menggambarkan bagaimana rasionalitas dan keadilan saling mempengaruhi, dalam konteks ekonomi berarti menyangkut masalah kelangkaan (*scarcity*). Hal itu ditunjukkan oleh Sen dengan ilustrasi tiga orang anak, Anne, Bob dan Carla dan seruling. Pertanyaannya: Ketika terjadi kelangkaan, dan hanya satu barang yang tersedia, apa solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan itu bila ada lebih dari satu orang dalam satu ruang penalaran yang sama? Anne mengklaim bahwa di antara mereka bertiga, dia yang seharusnya berhak atas seruling itu, karena hanya dia satu-satunya yang tahu bagaimana cara memainkan seruling itu (dan yang lain tidak bisa mengingkarinya)— yang dapat dibenarkan menurut kriteria utilitarian dan Aristotelian (bahwa tujuan/*telos* seruling adalah untuk dimainkan). Bob mengklaim seruling itu seharusnya menjadi haknya, dengan alasan bahwa anak-anak yang lain sudah punya mainan sedangkan dia sama sekali belum memiliki apapun untuk dimainkan, yang dapat dibenarkan dari nilai kesetaraan/egalitarian. Sementara itu, Carla bersikukuh bahwa seruling itu adalah haknya, sebab dialah yang membuatnya, yang dapat dibenarkan dengan kriteria libertarian.⁴³

Bila melihat ketiganya membawa argumen penalaran yang berbeda-beda, hal itu benar-benar merupakan pilihan yang sulit untuk ditentukan. Dilema pilihan atas perbedaan teori persuasi antara argumen utilitarian Anne, atau argumen egalitarian ekonomi ala Bob, atautkah argumen libertarian ala Carla. Ketiganya mengandung kebenarannya masing-masing. Bob dengan keterbukaan sebagai yang paling miskin dari ketiganya menggunakan argumen kesetaraan untuk sekadar mempersempit jurang kemiskinan. Di lain pihak, Carla yang merupakan pembuat seruling segera memperoleh simpati dari kaum libertarian. Sedangkan utilitarian hedonis tampak sangat keberatan, walau tetap memberikan pertimbangan yang pasti, karena argumen yang lebih kuat daripada egalitarian dan libertarian, argumen Anne berdasarkan aspek kemanfaatan bahwa tujuan dari seruling adalah untuk dimainkan, dan dialah satu-satunya yang bisa memainkan alat musik tersebut.⁴⁴

Bila orang memakai sistem pasar, Carla adalah produsen. Jadi, dia memiliki hak untuk menciptakan apa saja, sejauh ia mampu. Maka untuk mengatasi kelangkaan, Carla tidak masuk dalam pertimbangan, karena dia masih bisa menciptakan suling yang lain lagi. Oleh karena itu, argumen libertarian dapat disingkirkan. Sementara itu, Anne adalah pedagang, karena dia memiliki kemampuan untuk memainkan suling atau harga. Sedangkan Bob, adalah konsumen yang sangat miskin dan belum memiliki sesuatupun untuk dibanggakan seperti anak-anak lainnya. Maka, Bob seharusnya mendapatkan seruling itu, karena tujuan barang diproduksi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bila melihat ketiga argumen di atas dalam konteks kelangkaan (*scarcity*), perbedaan ketiganya bukanlah representasi divergensi mengenai keuntungan individual—dengan dalilnya masing-masing, merupakan suatu keuntungan bila memperoleh suling tersebut—melainkan perbedaan menyangkut prinsip-prinsip yang diterima bersama dalam mengatur sumber daya yang ada.⁴⁵

Dengan demikian, bagi Sen, untuk menentukan pilihan tanpa mengabaikan argumentasi yang lain, sering kali dibutuhkan penalaran publik dalam pluralitas jawaban yang benar. Di sini orang akan diantar kembali pada pertanyaan yang diajukan Sen mengenai dasar keputusan: Bagaimana orang akhirnya dapat sampai pada putusan agregat yang meyakinkan mengenai kondisi masyarakat, misalnya, bagaimana orang tahu dengan tepat bahwa suatu masyarakat lebih memilih menjadi petani

daripada tukang bangunan. Dalam bukunya *The Idea of Justice*, Sen sangat menekankan pentingnya penalaran publik untuk menentukan kualitas keadilan dalam ruang distribusi. Sen memiliki cara untuk memberikan pemahaman kepada khalayak pembaca dengan menggunakan ilustrasi yang sederhana. Dalam membicarakan rasionalitas dan keadilan, Sen menggunakan ilustrasi (selain tiga anak dan seruling di atas) yang diambil dari cerita epik Sansekerta dalam *Bhagavad Gita*, mengenai perdebatan antara Arjuna dan Krishna.⁴⁶

Dalam cerita tersebut, ada perdebatan Arjuna dan Krishna mengenai kerajaan Astina yang telah jatuh ke tangan para pasukan Kurawa. Dalam cerita tersebut, Arjuna berdebat dengan Krishna mengenai keputusan untuk menyerang. Bagi Arjuna, ia tidak ingin menyerang kerajaan itu, mengingat dampak yang akan diakibatkan seperti penderitaan, kematian, kehancuran, dan lain-lain. Dengan kata lain, menurut Sen, Arjuna tidak ingin berperang karena dia punya pertimbangan konsekuensial yakni pertimbangan dengan memperhatikan sebab-akibat dari suatu tindakan.⁴⁷ Sementara di lain pihak, Krishna menegaskan bahwa Arjuna memiliki kewajiban untuk memerangi, sebab dia adalah seorang jenderal.⁴⁸ Akan tetapi, dalam penalaran publik, kedua alasan itu tidak bisa diterima sebagai sesuatu yang final, sebab dalam argumentasi tersebut, terdapat bagian yang harus dilihat yakni memperhatikan sebanyak mungkin informasi mengenai kepelakuan yang relevan serta relasi personal dan impersonal bisa menjadi bagian dari pertimbangan.⁴⁹

Di sini Sen menekankan aspek dari hasil kulminasi dan hasil komprehensif. Sen mengajukan tiga argumen yakni dalam membuat keputusan, perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan berikut: a) agen atau pelaku yang terlibat, b) tindakan yang akan diambil, dan c) proses yang akan digunakan. Atau secara ringkas, proses, agen dan relasi. Tiga hal ini paling utama untuk dipertimbangkan dalam realisasi sosial.⁵⁰ Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan, terdapat tiga pokok yang diperoleh, yakni *pertama*, implikasi yang dihasilkan dari pilihan yang diambil. Argumen Arjuna yang bersifat konsekuensial tersebut menunjukkan kepeduliannya atas kehidupan itu sendiri, yang tidak boleh dihancurkan; *kedua*, adanya pertanggungjawaban agen atau pelaku atas tugas yang dijalankan. Argumen konsekuensial Arjuna tidak harus melupakan

tanggung jawabnya sebagai seorang jenderal yang punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kepercayaan tanpa hanya berpijak pada satu argumen; *ketiga*, relasi sosial yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Bahwa setiap keputusan yang dipilih harus dilihat sejauh mana putusan itu berdampak baik bagi hubungan personal maupun impersonal.⁵¹

c. *Interes dan Reduksi Rasionalitas Dalam Ekonomi*

Seperti telah dikatakan di atas tentang bagaimana kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kepentingan-diri para pemodal, maka untuk sampai pada argumen bahwa rasionalitas ekonomi sebagai urusan maksimalisasi kepentingan-diri, Sen mengajukan tiga hal sebagai motivasi yang perlu diakomodasi oleh konsep rasionalitas. *Pertama*, Keterpusatan diri (*selfishness*), baik menyangkut kesejahteraan (*welfare*), arah pilihan (*choice*) maupun tujuan (*goal*). *Kedua*, adalah ‘simpati’ (*sympathy*). Yang *ketiga*, ‘komitmen’ (*commitment*).⁵²

Yang menarik adalah bahwa perbedaan antara ‘simpati’ dan ‘komitmen’ dan distingsi antara keduanya punya tempat sentral dalam kritik Sen terhadap rasionalitas ekonomi. Simpati menunjuk pada proses di mana kepedulian atau pertimbangan mengenai kondisi orang lain secara langsung berdampak pada kesejahteraan seseorang. Hal itu dilakukan oleh Adam Smith sebelumnya ketika melihat konsep simpati sebagai dasar tatanan moral.⁵³ Simpati dalam pengertian umum sering dianggap berlawanan dengan egoisme. Akan tetapi bagi Sen, kesan itu menyesatkan, sebab perasaan sedih atau senang ketika melihat orang lain sedih atau senang tidak dapat dilepaskan kondisi atau kepentingan-diri sendiri sebagai pusat dari perasaan itu.⁵⁴ Maka, kepentingan-diri tidak harus menyingkirkan kapasitas saya untuk menempatkan diri pada situasi yang dialami orang lain, baik itu situasi susah maupun senang. *Sympathy* tidak dapat diakomodasi oleh *selfishness*, tetapi *sympathy* dapat dengan mudah diakomodasi oleh *self-interest*.⁵⁵

Konsep ‘komitmen’ (*commitment*) membawa masuk ke perubahan yang mendalam. Di situ letak sumbangan Sen bagi konsep rasionalitas. Bagi Sen, konsep ‘komitmen’ dalam teori tindakan membuka lanskap yang lebih luas yang dapat menjelaskan rasionalitas bukan pertama-tama sebagai urusan maksimalisasi kepentingan diri dan konsistensi internal. Maka, tindakan/

pilihan tindakan seperti loyalitas, pengorbanan, dan ketaatan dapat diakomodasi tanpa harus dianggap tidak rasional. Herry-Priyono membuat sebuah tabel⁵⁶ secara skematis untuk meringkas perbedaan empat konsep tindakan sebagai berikut.

Konsep	Keterangan
<i>Selfishness</i>	Aku adalah pusat kepentingan-diriku, dan tidak ada kepentingan diri orang lain yang lebih penting dari kepentingan-diriku.
<i>Self-interest/ self-love</i>	Aku adalah pusat kepentingan-diriku, tetapi kepentingan-diriku turut dipengaruhi oleh kepentingan diri orang lain.
<i>Sympathy</i>	Kepentingan-diriku dipengaruhi oleh kepentingan diri orang lain; aku senang ketika orang lain senang
<i>Commitment</i>	Aku punya kepentingan-diri, tetapi kepentingan diri itu bisa saja tidak aku kejar, tetapi aku lebih mengejar kepentingan yang kuanggap lebih baik, walau itu bukan kepentingan-diriku

Dari apa yang dipaparkan di atas, ada tiga hal yang ingin ditunjukkan oleh Sen. *Pertama*, Sen berusaha menyelamatkan konsep rasionalitas dari logika sirkular yaitu penetapan kebenaran (epistemik) dan kebaikan (etik) pilihan atas dasar apa yang aktual dipilih diri. Menurut Sen, merupakan satu kesalahan konseptual ketika berpikir bahwa syarat-syarat pilihan bersifat murni internal pada pilihan, padahal alasan-alasan terkait dengan tujuan atau nilai-nilai tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada apa yang beroperasi di balik/luar pilihan.⁵⁷

Kedua, Sen hendak melawan konsep rasionalitas ekonomi sebagai urusan maksimalisasi kepentingan-diri, sebab konsep rasionalitas itu bukan hanya amat sempit, tetapi juga membuat ilmu ekonomi bahkan kehilangan kekuatan deskriptif dan prediktif dalam analisisnya. Bagi Sen, memang benar bagaimana ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi juga membutuhkan momen penghematan konseptual, tetapi menyederhanakan perilaku ekonomi sebagai urusan memaksimalkan kepentingan-diri merupakan suatu bentuk pengehematan yang ekstrem. Dengan demikian, bukan hanya manusia yang tercerabut dari nilai-nilai dan etika (kecuali nilai kepentingan-diri), melainkan juga menyingkirkan ilmu ekonomi dari kemungkinannya untuk ikut membentuk tatanan keadilan dalam masyarakat yang lebih masuk akal.⁵⁸

Ketiga, Sen ingin mengajukan pengertian rasionalitas yang secara substantif berbeda dari apa yang secara umum dipakai dalam ilmu ekonomi.

Oleh karena itu, Sen mendefinisikan rasionalitas sebagai kecermatan dan disiplin melakukan pilihan-pilihan, baik sarana maupun tujuan tindakan, nilai-nilai dan prioritas, atas dasar pemeriksaan bernalar (*reasoned scrutiny*).⁵⁹

Simpulan: Kritik atas Rasionalitas Ekonomi

Satu hal yang membedakan antara manusia dengan ciptaan lainnya adalah keberadaan kemampuan untuk berpikir atau dengan kata lain akal budi, sehingga hal itu membentuk suatu kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam konteks kekuasaan ekonomi, sebagaimana dibicarakan sebelumnya, model ekonomi yang berkembang sekarang sangat kuat dipengaruhi oleh konsep yang dikemukakan oleh Edgeworth, yang mengatakan bahwa setiap orang dalam kesehariannya dipengaruhi atau digerakkan (*actuated*) hanya oleh kepentingan-diri. Berangkat dari pandangan tersebut, Sen kemudian mengajukan kritiknya bahwa pemerintah sering kali terlalu cepat memutuskan bahwa masyarakat lebih membutuhkan bantuan sosial—seperti “Program Keluarga Harapan” yang terjadi di Indonesia—daripada membutuhkan air bersih.⁶⁰ Penilaian yang gegabah seperti itu tanpa disadari mengabadikan tindakan pemiskinan, karena masyarakat dihibur dengan dana bantuan, lalu di saat yang sama hutan digunduli demi pertambangan, dan tanah diambil demi kepentingan kelompok kapitalis tertentu.⁶¹

Dengan usaha mengkritik rasionalitas ekonomi, Sen berusaha menyambung kembali etika dan ekonomi yang telah terputus karena konsep yang hanya memperhatikan kepentingan-diri dan melupakan kepentingan banyak orang. Sen melihat bahwa rasionalitas mementingkan diri membuat ilmu ekonomi bukan hanya sempit makna, melainkan juga kehilangan daya deskriptif dan prediktif.⁶² Apa yang dilakukan Sen kemudian adalah memberikan definisi rasionalitas yang berbeda secara substantif dari apa yang dipakai umum dalam ilmu ekonomi. Menurut Sen, rasionalitas merupakan suatu kecermatan serta disiplin dalam melakukan pilihan-pilihan, yang meliputi sarana maupun tujuan tindakan, nilai-nilai serta prioritas berdasarkan pemeriksaan bernalar (*reasoned scrutiny*).⁶³ Definisi rasionalitas yang diajukan Sen itu bukan hanya menyangkut pemeriksaan bernalar atas sarana, melainkan juga tujuan (*ends*) dan nilai-nilai (*values*), dan prioritas (*priority*) alasannya, karena bagi Sen, perilaku maksimalisasi

seringkali sangatlah tolol (*patently stupid*) serta tanpa pertimbangan, oleh karena bergantung hanya pada apa yang dimaksimalkan.⁶⁴

Akan tetapi, Sen juga mengingatkan bahwa menolak pendapat yang mengatakan orang selalu bertindak berdasarkan kepentingan-diri yang sempit tidak berarti berargumen bahwa orang selalu bertindak tanpa kepentingan diri.⁶⁵ Apabila menyimpang dari maksimalisasi kepentingan-diri sempit karena lebih mengikuti kebiasaan adat-istiadat, tidak bisa dikatakan sebagai irasional hanya karena keluar dari kriteria maksimalisasi kepentingan-diri. Bagi Sen, tuntutan rasionalitas pertama-tama bukan soal kesesuaian dengan tujuan atau nilai-nilai tertentu (yang melingkupi pemenuhan kepentingan-diri yang maksimal), tetapi lebih kepada harapan bahwa apa yang menjadi tujuan (*goals*) maupun nilai-nilai yang bukan tujuan (*non-goals*) tetap berlandaskan pada upaya pertimbangan dan pemeriksaan yang cermat.⁶⁶

Menurut Sen, maksimalisasi pada dasarnya digunakan dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial sebagai sebuah karakteristik perilaku. Akan tetapi apa yang menarik untuk dicatat di sini ialah bahwa maksimalisasi dalam ilmu ekonomi dilihat terutama sebagai hasil dari pilihan aktual. Cara berpikir tentang pilihan rasionalitas pada akhirnya membawa orang pada anggapan umum dalam ekonomi kontemporer bahwa pilihan aktual individu dapat ditafsirkan dengan baik dengan didasarkan pada beberapa bentuk maksimalisasi.⁶⁷ Rasionalitas kekuasaan ekonomi seringkali dipermainkan oleh kapitalis demi kepentingan pribadi. Misalnya, Sen sering mengatakan bahwa kemiskinan dan kelaparan itu terjadi bukan karena tidak ada makanan untuk dinikmati, karena sebenarnya makanan tetap melimpah. Kemiskinan dan kelaparan terjadi akibat tidak tersedianya akses yang memadai bagi masyarakat untuk menikmati makanan dan memiliki kehidupan yang pantas.⁶⁸

Pertanyaannya: Jika makanan melimpah, lantas mengapa tidak didistribusikan saja kepada masyarakat yang membutuhkan? Jawaban yang mungkin untuk pertanyaan ini adalah, akibat ketiadaan akses—ke gudang beras atau minyak goreng—sehingga pemahaman masyarakat sering diracuni informasi-informasi liar yang dimainkan oleh para makelar kapitalis, sehingga tampak seperti benar-benar tidak ada, dan bahkan hal itu diterima sebagai kebenaran; itu semakin diperkuat dengan

program pasar murah, sembako dan bantuan sosial lainnya. Substansi psikologis program pasar murah sembako tersebut memprihatinkan, sebab dinamika itu sesungguhnya merefleksikan kondisi rakyat sendiri yang *de facto* selalu berkekurangan, lapar, tak dikenal, dilupakan, menjadi korban. Ini menjadi sangat manusiawi ketika manusia cenderung mencari pemenuhan atau kompensasi pada figur yang bergaya ‘mesianik’. Karena selalu berkekurangan, terpinggirkan, dan tak dikenal, lalu mencari pemenuhan kenikmatan dan kompensasi pada figur-figur pesohor. Inilah wajah sosialitas manusia kontemporer yang oleh beberapa ahli disebut era politik libido.⁶⁹ Persoalan-persoalan demikian membawa Sen pada refleksi rasionalitasnya bahwa demi maksimalisasi kepentingan-diri, dengan menggunakan tindakan-tindakan yang kelihatan rasional—eperti mengatasi krisis dengan bantuan pasar murah—itu ibarat memimpin sepasukan kavaleri yang menunggang keledai yang lumpuh.⁷⁰

Oleh karena itu, usaha bantuan sosial dan pasar murah bukannya mengatasi problem kelangkaan, melainkan semakin memperkuat kondisi maksimalisasi modal serta memperlebar jarak ilmu ekonomi dan etika. Kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok bukanlah benar-benar langka, melainkan dikendalikan agar dengan demikian nilai tukar ekonomi yang tinggi dapat tercapai. Mengapa kelangkaan itu adalah suatu bentuk pengendalian? Bila benar-benar habis, bagaimana pasar murah bisa diadakan? Dari mana barang-barang itu diperoleh jika keadaan memang benar-benar langka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu yang paling mungkin adalah bahwa nilai guna ekonomi barang-barang kebutuhan pokok tidak lagi terletak pada nilai guna, melainkan bergeser pada tindakan antisipasi kepuasan hasrat (*desire*).⁷¹

Dengan demikian, nilai-tukar ekonomi (*exchange value*) semakin dilekatkan bukan pada materialitas kerja (*labour*), tetapi lebih pada penciptaan nilai-tukar ranah psikologis yang terkait dengan kepuasan hasrat (*desire*). Hal ini berimplikasi pada mundurnya ekonomi fisik dan berkibarnya ekonomi virtual, seperti iklan mengenai barang murah-meriah atau informasi pasar murah yang semakin memperkuat kondisi kelangkaan tersebut.⁷²

Bibliography:

- Bishop, Matthew. *Essential Economics*. London: The Economist, 2004.
- Dua, Mikhael. “Kesejahteraan dan Keagenan, Refleksi Amartya Sen”.
Jurnal Ledalero, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 369-386.
- Edgeworth, F. Y. *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. London: Kegan Paul & Co., 1881.
- Ezra, Ovadia. *Moral Dilemmas in Real Life: Current Issues in Applied Ethics*. Netherlands: Springer Publishing, 2006.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Herry-Priyono, B. *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- _____. *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- _____. *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- _____. *Ilmu Sosial Dasar: Asal-usul, Metode, Teori, plus Dialog dengan Filsafat & Teologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Keliat, Makmur., et al. *Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016.
- Molan, Benyamin. “Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik”. *Respons (Jurnal Etika Sosial)* Vol. 16, No. 02, Desember 2011: 255-285.
- Morris, Christopher W. (ed.). *Amartya Sen: Contemporary Philosophy in Focus*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Samuels, Warren J. et al. (eds.). *A Companion To The History of Economic Thought*. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
- Sen, Amartya. *Rationality and Freedom*. Cambridge, MA: Belknap Press, 2002.
- _____. *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 2009.
- _____. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton & Co, 2006.
- _____. *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, INC., 1999.
- _____. *On Ethics and Economics*. Oxford: Blackwell, 1987.

- _____. "Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory". *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 6, No.4 (1977): 317-344.
- _____. *Amartya Sen: Autobiography*. The Nobel Foundation, 1998.
- _____. *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North-Holland, 1999.
- _____. "The Possibility of Social Choice". *American Economic Review*, Vol. 89, No. 3, Nobel Lecture 1998 (1999): 349-378.
- _____. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press, 1981.
- _____. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- _____. "Well-Being, Agency, and Freedom". *The Journal of Philosophy*, Vol. 82, No. 4, April (1985): 169-221.
- _____. *On Economic Inequality*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Sindhunata, G. P. *Dilema Usaba Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Fankfurt, Max Horkheimer & Theodor W. Adorno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Smith, Adam. *The Theory of Moral Sentiments*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002 [1759].
- Prasetyantoko, A. "Krisis Ekonomi dalam Perspektif Keadilan Amartya Sen". *Respons (Jurnal Etika Sosial)* Vol. 16, No. 02 (Desember 2011): 181-197.
- Vaut, Simon, et al. *Lesebuch der Sozialen Demokratie 2: Wirtschaft und Soziale Demokratie*. Terj. Ivan A. Hadar. *Buku Bacaan Sosial Demokrasi 2: Ekonomi dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2010.

Endnotes:

- 1 F. Y. Edgeworth, *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences* (London: Kegan Paul & Co., 1881) 16.
- 2 *Ibid.*, 1; lih. A.M.C. Waterman, "Mathematical Modeling as an Exegetical Tool: Rational Reconstruction", *A Companion To The History of Economic Thought*, ed. Warren J. Samuels, et.al. (Oxford: Blackwell Publishing, 2003) 553-570.
- 3 *Ibid.*, 15-16.

- 4 Sen, "Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory", *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 6, No.4 (1977) 317.
- 5 Bdk. Sen, *Development As Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, INC., 1999) 116-118.
- 6 Sen, *On Ethics and Economics* (Oxford: Blackwell, 1987) 78.
- 7 *Ibid.*, 79.
- 8 B. Herry-Priyono, *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022) xiii.
- 9 Herry-Priyono, *Ilmu Sosial Dasar: Asal-usul, Metode, Teori, plus Dialog dengan Filsafat & Teologi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022) 100, 104-106.
- 10 Sen, *Development As Freedom*, *op. cit.*, 92.
- 11 Bdk. Ovadia Ezra, *Moral Dilemmas in Real Life: Current Issues in Applied Ethics* (Netherlands: Springer Publishing, 2006) section A.
- 12 Sen, *Development As Freedom*, *loc. cit.*
- 13 Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledab Naluri* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022) 359.
- 14 Simon Vaut, et al. "Lesebuch der Sozialen Demokratie 2: Wirtschaft und Soziale Demokratie", trans. Ivan A. Hadar, *Buku bacaan sosial demokrasi 2: Ekonomi dan Sosial Demokrasi* (Jakarta, Friedrich-Erbert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2009) 21.
- 15 Sen, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W.W. Norton & Co, 2006) 170-174.
- 16 Bdk. F. Budi Hardiman, *Memahami Negativitas: Diskursus Tentang Masa, Teror dan Trauma* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005) 29-30.
- 17 Sen, *Identity and Violence*, *op. cit.*, 173.
- 18 Sen, *Inequality Reexamined* (Oxford: Oxford University Press, 1992) 88.
- 19 Makmur Keliat, et al., *Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016) 85.
- 20 Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, *op. cit.*, xix.
- 21 Data dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-terjadi-212-letusan-konflik-agraria-lt63bc2116991c6> (access 13.06.2022).
- 22 Bdk. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003) 49.
- 23 Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, *loc. cit.*
- 24 Sen, *On Economic Inequality* (Oxford: Oxford University Press, 1997) 1.
- 25 *Ibid.*, 24.
- 26 Lih. A. Prasetyantoko, "Krisis Ekonomi dalam Perspektif Keadilan Amartya Sen", dalam *Respons* (Jurnal Etika Sosial) Vol. 16, No. 02 (Desember 2011): 181-197.
- 27 Lih. Benyamin Molan, "Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik", dalam *Respons* (Jurnal Etika Sosial) Vol. 16, No. 02 (Desember 2011): 255-285.
- 28 Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, *op. cit.*, 98-99.
- 29 Kevin Roberts, "Social Choice Theory and the Informational Basis Approach," *Amartya Sen: Contemporary Philosophy in Focus*, ed. Christopher W. Morris (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 115.

- 30 Sen, *Amartya Sen: Autobiography* (The Nobel Foundation 1998), http://nobelprize.org/nobel_prizes/economic/laurates/1998/sen-autobio.html. (access 4.10.2022); lih. juga dalam B. Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022) 353-357. Sen menulis: “Saya jelajahi seluruh pandangan teori pilihan sosial. Ada sejumlah temuan analitis; tetapi kendati ada beragam ‘pohon’, saya tak tahan untuk mencari mana hutannya. Saya terpaksa kembali ke pertanyaan lama yang menggugah saya ketika masih berusia belasan tahun di Presidency College: apakah pilihan sosial yang masuk akal masih mungkin, mengingat perbedaan-perbedaan antara preferensi seorang (termasuk kepentingan dan penilaian) dan preferensi orang lain (seperti pernah ditulis oleh Horatius: ada banyak pilihan sebanyak jumlah manusia)”.
- 31 Matthew Bishop, *Essential Economics* (London: The Economist, 2004) 275: Welfare economics “is the study of how different forms of economic activity and different methods of allocating scarce resources affect the wellbeing of different individuals or countries. Welfare economics focuses on question about equity as well as efficiency”.
- 32 Sen, “The Possibility of Social Choice,” *American Economic Review*, Vol. 89, No. 3, Nobel Lecture 1998 (1999): 349-378.
- 33 Sen, *Autobiography*, *op. cit.*, 8. Sen bertanya: “Bagaimana mungkin kita dapat sampai pada putusan-putusan agregat yang meyakinkan tentang masyarakat (misalnya tentang kesejahteraan sosial, atau kepentingan publik, atau kemiskinan agregat) mengingat keragaman konsern, preferensi dan kesulitan setiap orang yang berbeda-beda dalam masyarakat? Bagaimana kita dapat menemukan dasar yang rasional tentang apakah masyarakat memilih yang ini dan bukan yang itu, atau masyarakat seharusnya memilih ini daripada itu?”
- 34 Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, *op. cit.*, 360.
- 35 Sen, *Autobiography*, *op. cit.*, 41.
- 36 Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, *op. cit.*, 263.
- 37 *Ibid.*, 399.
- 38 G. P. Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt, Max Horkheimer & Theodor W. Adorno* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) 80-81.
- 39 *Ibid.*, 82-83.
- 40 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. One: Reason and The Rationalization Society*, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984) 241.
- 41 Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022) 267.
- 42 Mikhael Dua, “Kesejahteraan dan Keagenan, Refleksi Amartya Sen”, dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2012): 369-386 [374].
- 43 Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press)13.
- 44 *Ibid.*
- 45 *Ibid.*, 15.
- 46 *Ibid.*, 208.
- 47 *Ibid.*, 209.
- 48 *Ibid.*
- 49 *Ibid.*, 215.

- 50 *Ibid.*, 217.
- 51 *Ibid.*, 217-219.
- 52 Untuk tiga hal ini, penulis mendasarkan diri pada kajian rinci yang dilakukan oleh Herry-Priyono dalam bukunya *Memburu Manusia Ekonomi, Mengeledah Naluri*, *op. cit.*, 366-369.
- 53 *Ibid.*, 367. Adam Smith dalam bukunya *The Theory Of Moral Sentiment* mengatakan, bahwa karena tidak mengalami langsung apa yang dirasakan oleh orang lain, kita tak punya gambaran bagaimana mereka terkena akibat tindakan kita kecuali dengan membayangkan apa yang akan kita alami seandainya kita berada pada posisi mereka.
- 54 *Ibid.* Itulah mengapa kemudian Sen mengatakan bahwa “perilaku yang muncul dari simpati dengan mudah tetap dikategorikan sebagai bagian dari egoisme”.
- 55 *Ibid.*, 368. Sen, sebagaimana dikutip oleh Herry-Priyono, menulis demikian: “Orang tidak perlu berpusat pada diri (*self-centered*) untuk menjadi berkepentingan-diri (*self-interest*); orang yang berkepentingan diri dapat memperhatikan kepentingan orang lain dalam rangka kepentingan-dirinya”.
- 56 *Ibid.*, 369.
- 57 Sen, *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Belknap Press, 2002) 21.
- 58 *Ibid.*, 23.
- 59 *Ibid.*, 24.
- 60 Bdk. Sen, “Rational Fools” , *art. cit.*, 323.
- 61 Bdk. Sen, *Rationality and Freedom*, *op. cit.*, 66.
- 62 Bdk. *ibid.*, 23.
- 63 *Ibid.*, 4.
- 64 *Ibid.*, 39.
- 65 Sen, *On Ethics and Economics*, *op. cit.*, 19.
- 66 Sen, *Rationality and Freedom*, *op. cit.*, 41.
- 67 Sen, *The Idea of Justice*, *op. cit.*, 175.
- 68 Sen, *Poverty and Famines*, *op. cit.*, 2.
- 69 Bdk. Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, *op. cit.*, 215-216.
- 70 Sen, *On Ethics and Economics*, *op. cit.*, 16.
- 71 Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, *op. cit.*, 217.
- 72 *Ibid.*, 221-222.